

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul **“Implementasi Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas”**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meratanya kualitas pendidikan di Kabupaten Banyumas. salah satu faktor penyebab belum meratanya kualitas pendidikan di Kabupaten Banyumas ialah belum terpenuhinya semua indikator-indikator SPM pendidikan dasar di beberapa Sekolah dasar di Kabupaten banyumas. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah kabupaten Banyumas mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari APBN, yang kemudian dialokasikan untuk memperbaiki sekolah-sekolah penerima bantuan. Dalam menentukan penerima bantuan, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas berpedoman pada data sarana dan prasarana masing-masing UPK.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas. Sasaran dalam penelitian ini ialah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam hal ini kasubag bina program, kepala UPK kabupaten Banyumas serta kepala Sekolah Dasar Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar sudah berjalan namun belum berjalan dengan maksimal jika dilihat dari *input*, proses, serta *output*. Dari faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi untuk aspek Disposisi sudah dapat dipenuhi dengan baik sedangkan dari aspek Komunikasi, Sumber Daya serta Struktur Birokrasi belum dapat dipenuhi dengan maksimal.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi, Pendidikan, SPM Pendidikan Dasar.

SUMMARY

This study, entitled "Implementation of Ministerial Regulation 15/2010 About Minimum Service Standards (SPM) Basic Education in Banyumas". This research is motivated by the uneven quality of education in Banyumas. One factor contributing to the uneven quality of education in Banyumas is not the fulfillment of all indicators SPM basic education in some primary schools in the district of Banyumas. To overcome these problems, Banyumas regency government to allocate Special Allocation Fund (DAK) from the state budget, which is then allocated to improving schools beneficiaries. In determining the beneficiaries, the Department of Education Banyumas guided by the data infrastructure of each CGU.

This study aims to describe the implementation Permendiknas number 15/ 2010 on Minimum Service Standards (SPM) basic education in Banyumas. The target in this study are employees of the Department of Education Banyumas in this case the Head coaching program, UPK head Banyumas district and Primary School head Banyumas. The method used in this research is descriptive qualitative method, with the informant selection techniques menggunakan purposive sampling.

Results from the study showed that the implementation of the implementation Permendiknas number 15/2010 on minimum service standards for basic education is already running but is still can not fulfilled to the maximum if looked by input, process and output. The factors for successful implementation and the communication disposition aspect already met with both while in terms of communication, resources and bureaucratic structures can not be fulfilled to the maximum.

Keywords: Public Policy, Implementation, Education, SPM Basic Education.